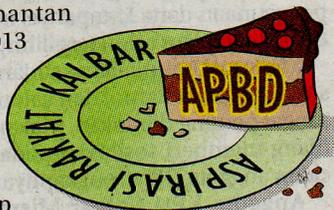




APBD 2013 Dinilai Belum Wakili Rakyat Kalbar

PONTIANAK—Koordinator Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai anggaran yang berada di pos Sekretariat DPRD dan Legislatif Kalbar tahun 2013 dianggap belum mewakili aspirasi rakyat Kalimantan Barat. Ada beberapa item yang harus mendapatkan penjelasan.

Misalnya, Fitra menyoroti pembangunan ruang Badan Anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp600 juta. "Anggarannya cukup besar. Coba untuk



bantu infrastruktur Kalbar pasti sangat berguna," ucapnya dalam siaran pers releasenya dikirimkan via email kepada Pontianak Post.

Bukan hanya pos anggaran tahun 2013 mendapatkan kritikan tajamnya. Pos anggaran pada tahun 2012 khusus Renovasi Ruang VIP Sekretariat DPRD Kalbar dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp600 juta juga mendapat masukan. Dua ruangan tersebut yang bentuknya hampir serupa dianggarkan berturut-turut. "Total dana dikeluarkan mendekati Rp1,2 miliar," katanya.

Fitra yang dikenal tajam mengkritisi APBD

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



APBD 2013 Dinilai Belum Wakil Rakyat Kalbar

Sambungan dari halaman 1

dan APBN mengatakan jasa premi Premi Asuransi Kesehatan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sebesar Rp550 juga perlu dijelaskan. Pasalnya untuk satu orang mendapat premi asuransi sebesar Rp10 juta untuk tahun 2013. "Kalau jumlah anggota dewannya 55 orang," kata dia. Ukok menilai anggaran rehab ruang VIP, ruang banggar di sekretariat dewan dan premi angsuran belum mempertontonkan rasa ketidakadilan. Seharusnya diutamakan APBD bagi kesejahteraan rakyat.

Dikonfirmasi terpisah Sekretaris Dewan Kalbar, Bambang Soerachmat menjelaskan kritikan Fitra terhadap anggaran di pos sekretariat dan dewan Kalbar tidak ada persoalan. Pasalnya ruang VIP, nilai premi asuransi sudah diaudit secara benar dan transparans oleh BPK RI wilayah Kalbar. "Untuk ruang Badan Anggaran (Banggar) memang belum karena belum tutup tahun. Tetapi saya yakin tidak ada persoalan," ujarnya.

Bambang menuturkan pembangunan ruang VIP di DPRD Kalbar memang dibangun karena berkaitan dalam rangka pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada 14 Januari 2013 lalu. Kebutuhan dibangunnya ruang VIP karena tamu-tamu dalam ruangan yang hadir cukup banyak. Tamu-tamu VIP tersebut diantaranya Menteri, Pejabat Eselon 1 sekelas Dirjen, tokoh nasional, tokoh

masyarakat Kalbar dan lain sebagainya. "Dibangun memang kebutuhannya mendesak dan representatif sekali untuk menyambut para tamu. Apalagi lembaga DPRD penuh agenda protokol. Semua unsur muspida dari lembanas, tamu luar negeri seperti Malaysia selalu diterima dan diakomodir di ruangan VIP tersebut," ujarnya.

Keberadaan ruangan VIP tidak hanya sekedar menerima para tamu. Namun juga sering dipakai kegiatan pers release dari unsur pimpinan dewan-BPK termasuk Gubernur Kalbar sendiri beberapa waktu lalu mempergunakan ruangan serupa sama. "Kita selama ini juga tidak punya ruang VIP representatif untuk menerima tamu-tamu penting dan VIP," ungkap dia.

Sementara pembangunan Ruang Badan Anggaran (Banggar) tahun 2013 sebelumnya berdasarkan koordinasi pimpinan. Itu juga menyangkut kebutuhan rapat-rapat di Badan Anggaran. Hanya di DPRD Kalbar selama ini tidak memiliki ruang Banggar sebagaimana di Provinsi lain yang sudah memilikinya. "Di DPRD Kalbar belum ada. Makanya digagas dan dibangun dengan struktur kebutuhan bangunan dan berdasarkan nilai serupa," katanya.

Bambang menyampaikan mekanisme pembangunan gedung Banggar juga mengikuti pelelangan dan mekanisme aturan. Hanya soal interior di dalamnya memang belum dilengkapi. Selama ini untuk

rapat Banggar selalu mempergunakan ruang serbaguna. Hanya terkadang jadi persoalan apabila di waktu sama ruang serbaguna dipakai. "Rapat antara pimpinan dewan dan tim anggaran eksekutif selama ini tidak jarang memakai ruang pimpinan. Dengan keberadaan ruang banggar, kini rapat sudah dilakukan di ruang Banggar," tutur dia.

Soal besaran asuransi anggota dewan juga tidak ada persoalan. Mekanismenya sudah diatur dalam PP nomor 16 tahun 2010. Kebutuhan mengkomodir asuransi para wakil rakyat juga masuk Perda nomor 1 tahun 2005 yang besarnya ditetapkan di perda adalah Rp10 juta per satu anggota. "Kalau anggota dewan jumlahnya 55 orangnya nilainya memang wajar Rp550 juta," tutur dia.

Meski demikian nilai premi asuransi sebesar Rp10 juga ikut tanggungan satu istri dan dua anak. Nilai real sebenarnya adalah Rp2,5 juta per tanggungan per satu orang dengan mekanisme pelayanan penuh. Mekanismenya juga melalui pelelangan yang dimenangkan asuransi Bumida. "Intinya di Sekretariat Dewan Kalbar cukup terbuka. Secara fisik barangnya ada. Berdasarkan audit BPK juga tidak ada masalah," jelasnya.

Ukok dalam siaran pers releseny juga mengkritisi adanya Rehabilitas Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Barat tahun 2013 dengan HPS (Harga Perkiraan Sementara) sebesar Rp1.49 miliar. Rehab Rumah

yang memakai dana rakyat terbilang tidak kecil. "Cukup "wow" anggarannya. Untuk melakukan rehab saja, begitu tinggi dan mahal biaya yang harus dikeluarkan dari APBD Kalbar," tuturnya.

Kemudian lanjut Ukok, tidak cukup untuk rehab rumah untuk Gubernur Kalbar saja. Pada tahun 2012, ada juga Pembangunan Gedung/Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Kalbar dengan HPS sebesar Rp647.000.000. "Pembangunan rumah untuk kedua pejabat daerah ini memperlihatkan jauh dari hidup sederhana," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat M. Zeet Hamdy Assovie seusai meninggalkan gedung DPRD Kalbar menuturkan sah-sah saja kritikan atau masukan disampaikan Fitra kepada Pemerintah Kalbar. Hanya juga perlu diingat, selama ini pemerintah selalu mengutamakan efektivitas dan transparansi anggaran ketika memakai APBD. Biasanya kalau tidak efektif BPK RI akan mempertanyakannya. BPK berhak mengauditnya. "Bukannya di kita. Kalau tidak efektif BPK RI pasti memberikan catatan termasuk nama anggaran. Hasil audit selama ini tidak ada masalah," ungkapnya.

Yang juga perlu diketahui masyarakat Kalbar adalah dari juru bicara DPRD Kalbar posisi keuangan Kalimantan Barat secara nasional masuk kategori sehat. "Jadi tidak ada persoalan," ucapnya singkat seraya masuk ke dalam mobil dinasny. (den)